

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Buku

- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia* (1st ed.). Cv. Budi Utama.
- Eko, R. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional* (2nd ed.). PT. Raja GraPindo Persada.
- Gunakaya, W. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia* (A. Ari, Ed.). Andi.
- Ismiati, S. (2020a). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia* (1st ed.). Cv. Budi Utama.
- Pawestri, A. (2021). *POLITIK HUKUM :Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (Apriliana). Scopindo Media Pustaka.
- Rozikin, R. M. (2017). *LGBT DALAM TINJAUAN FIKIH* (1st ed.). UB Press.
- Sadi, M. (2021). *Hukum Hak Asasi Manusia* (1st ed.). KENCANA.
- Sudi, M. (2016). *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945* (1st ed.). CV.Rasi Terbit.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum* (1st ed.). PT Raja Grapindo Persada.
- Tasrif, M. (2016). *Islam, LGBT & Hak Asasi Manusia* (R. U. Janah, Ed.; 1st ed., Vol. 1). STAIN Po Press.
- Zainul, Q. A. (2016). *Islam Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Komprehensif* (1st ed.). CITRA.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, Dan Infeksi Menular Seksual.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perbuatan Maksiat.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perbuatan Maksiat.

Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 47 Tahun 2023 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat

## **C. Jurnal**

Almaida, Z. (2021). Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*, 9(1), 1–9.

Ayuningrum, A., Patrecia, A. H., Puspayanti, D., & Lorensia, D. (2023). Perspektif Agama-Agama Di Indonesia Terhadap Homoseksual. 1, 1–1.

- Bhineka, I. K. G., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2021). Pengaturan Hubungan Menyimpang di Luar Perkawinan bagi Lesbian Dan Gay dalam Perspektif Hukum Hindu. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 83–87. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2799.83-87>
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 56–65.
- Ismiati, S. (2023). *Gender Equality Foundation In A Family To Anticipate Abuse. Indonesian Journal Of Multidisciplinary Science*, 2(8), 2908–2915.
- Laili, A., & Fadhila, A. R. (2021). Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.). *Jurnal Sinda*, x(x).
- Mawuntu, julio. (2018). Upaya Hukum Terdakwa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 7(1), 21–27.
- Pambudi, A., & Yitawati, K. (2022). Faktor Yang Menimbulkan Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual Dan Transgender (LGBT) Dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.562>
- Pepriyana, A., & Sahadatul Alawiyah, N. (2022). Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ham*, 1–11.
- Putra, A., Zebua, M. N., Nome, N., & Keluanan, Y. H. (2023). Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena LGBT Bagi Gereja dan Masyarakat Masa Kini. *Jurnal Kala Nea*, 4(1), 51–64. <http://jurnal.sttimmanuelsintang.ac.id/index.php/sttis/index>
- Rahmianti, E., Isnani, J., Aulia, P., & Mangkurat, U. L. (2023). *Ideologi Pancasila*

*sebagai Pandangan Hidup. 1*, 1053–1063

Sati, N. I. (2020). KETETAPAN MPR DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 834. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2343>

Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139–155. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>

Suparto. (2017). Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. *Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, 1–24.

Yasa, A. P. (2023). Dimensi Filosofis Hak Asasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia: Rivalitas Naturalisme Dan PositivismE. *Journal Transformation of Mandalika*, 4(6). <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/issue/archive>

#### **D. Sumber Lain**

Kamil, I., & Prabowo, D. (2022). *Terbukti LGBT, Pengadilan Militer Jakarta Pecat dan Penjarakan 3 Anggota TNI*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/13/20284961/terbukti-lgbt-pengadilan-militer-jakarta-pecat-dan-penjarakan-3-anggota-tni>

Kholid, I. (2017). *Polisi Gerebek Pesta Gay “The Wild One” di Kelapa Gading*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-3507704/polisi-gerebek-pesta-gay-the-wild-one-di-kelapa-gading>

Saputra, A. (2022). *Pengadilan Militer Jakarta Pecat 3 Anggota TNI yang Terbukti LGBT*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6288942/pengadilan->

[militer-jakarta-pecat-3-anggota-tni-yang-terbukti-lgbt](#)

Syufiana, T. (2017). *Pelaku Pesta Gay Divonis Dua Tahun Penjara*. Deutsche Welle. <https://www.dw.com/id/pelaku-pesta-gay-di-jakarta-divonis-dua-tahun-penjara/a-41838739>

Pramesti, T. J. A. (2024, April 11). *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-c14012/>

Tim Hukum Online. (2024, March 24). *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>